BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah diperlukan adanya kerjasama pada setiap pelaku ekonomi daerah sehingga program pembangunan yang dibuat dapat terlaksana. Pada dasarnya hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.[1] Dalam mengembangkan perekonomian daerah, Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal mengatur pengeluaran Pemerintah Daerah untuk belanja modal.

Belanja modal secara umum dapat dikatakan sebagai pengeluaran pemerintah yang diutamakan untuk fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal *(capital expenditure)* merupakan belanja Pemerintah Daerah yang termasuk dalam belanja langsung yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja

[1]Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), Hal. 4

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.[2] Belanja modal meliputi belanja bangunan seperti gedung, belanja infrastruktur, serta belanja modal lainnya yang mengutamakan untuk kepentingan pelayanan publik. Adanya otonomi daerah mendorong setiap Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan daerah terutama terkait dengan pembangunan daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang menjadi prioritas demi memenuhi pelayanan masyarakat secara umum. Hal ini pula yang terjadi pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan laporan Kanwil Bank Indonesia wilayah VI (Jawa Barat-Banten), pada triwulan I/2013 belanja modal yang direalisasikan baru sebesar 0,82% dari total belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp1,192 triliun dimana pencapaian ini sangat rendah jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada triwulan I/2012 yang dapat mencapai 5,19% dari total belanja modal sebesar Rp1,31 triliun.[3] Pengurangan jumlah belanja modal dapat dilihat dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada pengeluaran sebelumnya. Dalam hal ini, besarnya pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan sejumlah pengeluaran lain.

Berdasarkan laporan Kanwil Bank Indonesia wilayah VI, realisasi belanja Pemprov Jabar pada triwulan I/2013 masih didominasi belanja operasi, seperti belanja pegawai dan hibah. Realisasi belanja hibah merupakan yang terbesar dari segi persentase, yakni 19% atau Rp 1,029 triliun dari total anggaran hibah sebesar Rp 5,350 triliun yang diikuti oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp 334,41

[2]Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), Hal. 73
[3]http://www.pikiran-rakyat.com/node/234780 (Diakses Tanggal 10 Mei 2013)

miliar atau 15,91% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp 2,102 triliun.[4] Melihat laporan data di lapangan, pengurangan pada belanja modal dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan kepada pengeluaran belanja lainnya sehingga ketika pemerintah lebih berkonsentrasi kepada pengeluaran belanja lain maka realisasi untuk belanja modal menjadi berkurang. Kecilnya realisasi untuk belanja modal dikarenakan penempatan komposisi belanja modal masih belum diprioritaskan sehingga belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lebih terkonsentrasi untuk lebih membiayai pengeluaran belanja yang lain. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah harus mampu mengetahui prioritas utama yang dibutuhkan daerah. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka kegiatan pembangunan tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Acuviarta Kartabi, porsi belanja pegawai sudah harus dikurangi, dan pemerintah lebih menekankan pada belanja modal, kinerja pemerintah dinilai kurang optimal apabila porsi belanja pegawai lebih tinggi ketimbang belanja modal yang sifatnya tak langsung apalagi bila mengingat banyak sarana prasarana di Jabar masih banyak yang belum optimal, seperti jalan raya yang rusak.[5] Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kabupaten/kota sebanyak dua puluh enam dimana terdapat sembilan kota dan tujuh belas kabupaten dengan luas wilayah sebesar luas 35.377,76 Km^2 serta jumlah penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa.[6] Dari data-data tersebut dapat digambarkan bagaimana kebutuhan akan fasilitas pelayanan publik sangat dibutuhkan. Fasilitas publik yang dimiliki oleh setiap daerah cukup menggambarkan kondisi daerah yang artinya apakah daerah

[4] http://www.pikiran-rakyat.com/node/234780 (Diakses Tanggal 10 Mei 2013)
[5] http://www.pikiran-rakyat.com/node/234780 (Diakses Tanggal 10 Mei 2013)
[6] http://www.jabarprov.go.id/index.php (Diakses Tanggal 9 April 2013)

tersebut merupakan daerah yang tertinggal atau daerah yang cukup maju. Indikator untuk menilai sebuah daerah dikatakan sebagai daerah tertinggal adalah seperti indikator ekonomi, potensi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kapasitas daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.[7] Hal tersebut cukup memberikan deskripsi mengenai daerah yang bersangkutan. Secara umum besarnya alokasi untuk belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain adalah jumlah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki, tingkat bunga, dan ekspektasi mengenai masa depan.[8] Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan akan karakter daerah seperti luas daerah, jumlah penduduk, serta prioritas kebutuhan yang diperlukan oleh daerah.

Jumlah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki menentukan dalam besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pada suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi maka pengeluaran yang dilakukan cenderung lebih tinggi dari pada rumah tangga yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih sedikit maka pengeluaran yang dilakukan cenderung sedikit. Pada tingkat bunga juga dapat berpengaruh terhadap belanja. Besar atau kecilnya tingkat bunga pada waktu tertentu menentukan terhadap belanja yang dikeluarkan pemerintah. Disamping itu, PDRB juga berpengaruh terhadap besarnya jumlah pengeluaran khususnya belanja modal.[9] Diantara semua faktor dalam pengeluaran daerah, faktor yang paling dominan yang berpengaruh

---

[7] http://kpdt.bps.go.id/index.php?InfoUmum/index (Diakses, 7 Januari 2013)

[8] Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Delapan, Jilid II* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), Hal. 70

[9] Askam Tuasikal, *Kajian Tentang Dana Perimbangan PAD dan PDRB serta Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia),* Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol.3, No.1, 2008. Hal. 58

pada besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah penerimaan atau pendapatan daerah.

Pendapatan merupakan tolak ukur utama dalam merealisasikan belanja daerah. Diperlukan adanya manajemen pendapatan dikarenakan besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintah, tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Menurut Osborne dan Gaebler dalam Mahmudi dikatakan sebagai pemerintahan yang berwirausaha *(entrepreneurial government),* artinya pemerintah yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif, mampu mengolah potensi ekonomi yang ada secara efisien dan efektif.[10] Pemerintah Daerah harus mengetahui karakteristik kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah Daerah dapat memiliki sendiri usaha-usaha strategis (BUMD) dan *profit centers*, diantaranya adalah membuka lapangan kerja, membentuk jaringan usaha, dan dapat dilakukan pula dengan membentukan konsolidasi ekonomi kota-desa (kota sebagai pusat bisnis menjalin kegiatan ekonomi antar kota berikut pinggiran kota dan pedesaan).[11] Besarnya pendapatan daerah yang dihasilkan tergantung pada kreativitas dan usaha terutama strategi Pemerintah Daerah dalam melihat peluang penerimaan daerah serta menghidupkan sumber-sumber potensi pendapatan yang dimiliki daerah.

[10]Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal. 14

[11]Sri Edhie Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan Mutualism & Brotherhood* (Jakarta: UNJ Press, 2005), Hal. 204-205

Pendapatan daerah terdiri atas beberapa bagian, antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan yang cukup dominan yaitu pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Penurunan kondisi belanja modal daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang diterima. Dalam mengupayakan pendapatan daerah yang lebih besar Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah untuk mengantisipasi minimnya kas untuk pengeluaran pemerintah, karena hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah terutama dalam kegiatan pembangunan. Berikut adalah bagan mengenai sumber-sumber Pendapatan Daerah.

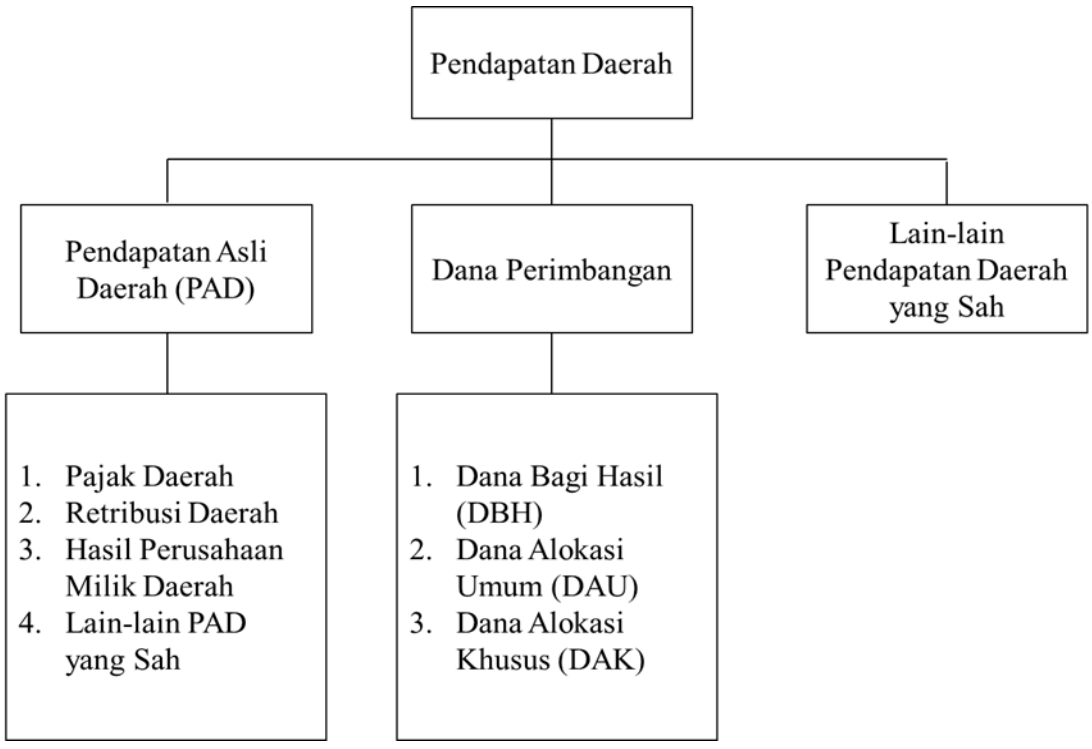

Gambar I.1 : Klasifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Sumber : M. Suparmoko. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah (2002:33), Diolah Kembali

Dari gambar diatas dapat dilihat berbagai sumber dari pendapatan daerah yang besarnya berpengaruh terhadap belanja daerah. Penerimaan daerah pada Provinsi Jawa Barat berasal dari Pendapatan daerah dan Pembiayaan. Apabila jumlah pendapatan daerah kecil maka pengeluaran pemerintah terutama pada belanja daerah cenderung kecil. Pada setiap tahun kondisi belanja daerah pada seluruh kabupaten/kota di daerah Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan menigkat.

Dengan sejumlah anggaran yang ada, Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai pemegang wewenang di daerah harus dapat mengetahui besarnya intensitas kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh daerah, sehingga belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah dapat bernilai efektif terutama untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Berikut adalah data jumlah belanja daerah secara keseluruhan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 1.1
Data Belanja Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2011 (Ribu Rupiah)

No.	Belanja Daerah	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Belanja Tidak Langsung *(Indirect Expenditure)*	18.862.573.992	22.363.579.125,03	24.548.647.636,24
2	Belanja Langsung *(Direct Expenditure)*	10.789.564.996	11.884.217.393,97	15.670.620.249,79
Jumlah/*Total*		29.652.138.988	34.247.796.519	40.219.267.886,03

Sumber **: BPS Jawa Barat (Data Diolah)**

Pada periode 2009 sampai dengan 2011, kondisi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan. Jumlah

belanja langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Jika diketahui bahwa belanja langsung merupakan belanja modal yang pemanfaatannya untuk pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Komponen pertama dalam pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada setiap pendapatan daerah yang diterima oleh kas daerah memiliki berasal dari beberapa sumber penerimaan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[12] Penerimaan daerah yang berasal dari PAD didominasi oleh penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Dalam hal ini, pajak merupakan sumber PAD yang paling besar. Ketika penerimaan pada sektor pajak menurun maka akan cukup berpengaruh terhadap besarnya pendapatan PAD.

Pemerintah Daerah harus mampu mengambil langkah dalam upaya meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD sehingga akan mengurangi subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khususnya subsidi yang berupa dana perimbangan (DAK) dan untuk mengurangi beban di dalam APBN. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Penerimaan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat.

[12]Abdul Halim , *Op. cit.*, Hal.67

Tabel I.2

Data PAD Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Tahun 2009-2011 (Ribu Rupiah)

No.	Pendapatan Asli Daerah *(Original Local Government Revenue)*	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Pajak Daerah *(Local Taxes)*	1.129.999.410	1.408.366.856,62	3.291.533.758,78
2	Retribusi Daerah *(Local Retribution)*	1.008.090.513	793.588.075,19	794.117.731,63
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *(Income of Regional Government Corporate and Management Separated Regional Government Wealth)*	185.987.664	233.426.902,04	214.469.543,33
4	Lain-lain PAD yang Sah *(Other Original Local Government Revenue)*	714.214.167	1.205.207.980,72	1.568.758.623
Jumlah/*Total*		3.038.291.754	3.640.589.814,57	5.868.899.656,73

***Sumber* : BPS Jawa Barat (Data Diolah)**

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tiga tahun terakhir pajak masih menjadi sumber penerimaan PAD yang paling besar. Pada tahun 2008, sumber penerimaan PAD yang paling besar berasal dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 1,06 Trilyun.[13] Pajak daerah terbagi dalam beberapa bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Komponen kedua yang menjadi sumber pendapatan Daerah adalah Dana Perimbangan. Pada setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan alokasi dalam APBN untuk Dana Perimbangan. Komponen pendapatan daerah ini mengambarkan keterkaitan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yaitu dalam hal keuangan.

[13] http://www.jabarprov.go.id/index.php (Diakses, 7 Januari 2013)

Pola hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebut perimbangan keuangan. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal I disebutkan bahwa, perimbangan keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pebantuan.[14] Sedangkan yang dimaksud dengan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.[15] Dana perimbangan yang digunakan untuk membiayai belanja modal dalam rangka pembangunan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.[16] DAK dipersiapkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat khusus. DAK dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Secara garis besar yang dimaksud dengan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam membantu membiayai kekurangan dana belanja yang

[14]Achmat Subekan dan Nafsi Hartoyo, *Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan* (Malang: Altapustaka, 2012), Hal. 47

[15]Abdul Halim. *Op. cit.*, Hal. 141

[16]Sonny Sumarsono. *Manajemen Keuangan Pemerintah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hal. 90

dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab *(akuntabel),* serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.[17] Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pada setiap tahunnya memiliki jumlah yang berbeda-beda. Pemerintah memiliki pertimbangan dalam menyesuaikan jumlah transfer dengan kondisi wilayah yang bersangkutan. Berikut adalah data mengenai besarnya Dana Perimbangan pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tabel I.3

Data Dana Perimbangan Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Tahun 2009-2011 (Ribu Rupiah)

No.	Dana Perimbangan *(Balanced Budget)*	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *(Tax Share/ Non Tax/Natural Resources)*	3.973.544.831	4.339.046.312,21	3.857.298.131,15
2	Dana Alokasi Umum *(General Allocation Funds)*	17.238.050.261	17.604.174.214	19.472.659.449,52
3	Dana Alokasi Khusus *(Special Allocation Funds)*	1.301.868.705	1.690.948.735	1.660.750.889,54
Jumlah/*Total*		22.513.463.797	23.634.169.261,21	24.990.208.470,21

***Sumber* : BPS Jawa Barat (Data Diolah)**

[17]Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin.*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal. 175

Dana perimbangan yang digunakan untuk kegiatan belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa DAK merupakan transfer pemerintah yang jumlahnya paling rendah. DAU merupakan transfer pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sedangkan DAK digunakan untuk membiayai belanja modal Pemerintah Daerah. Pentingnya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pada setiap daerah kabupaten/kota dalam mengelola pendapatan daerah yang mereka miliki khususnya PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal yang dimiliki pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah khususnya PAD dan DAK berpengaruh terhadap besarnya anggaran belanja modal. Dari faktor-faktor yang dijelaskan diatas, peneiliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara lebih mendalam mengenai pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Karena belanja modal akan mendorong kemajuan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, dengan adanya belanja daerah yang proportional dan lebih merata pada setiap kabupaten/kota di Jawa Barat diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum dan menghindari adanya ketimpangan sosial antar daerah.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi rendahnya tingkat belanja modal sebagai berikut:

1. Jumlah pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Tingkat bunga
4. Ekspektasi
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
6. Jumlah penduduk
7. Luas wilayah

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang peneliti sebutkan, masalah tingkat belajar daerah merupakan masalah yang kompleks dan luas cakupannya. Dikarenakan keterbatasan peneliti pada waktu, tempat, dan dana untuk pemecahan masalah tersebut, maka peneliti hanya membatasi permasalahan yang diteliti hanya pada masalah, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal"

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, sebagai pembuktian atas kebenaran terhadap teori-teori yang terdahulu.
2. Secara empiris, sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan serta sebagai pembelajaran atau pengalaman dalam penyusunan APBD diwaktu yang akan datang.
3. Untuk peneliti, menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan berpikir tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk Fakultas Ekonomi khususnya Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi sebagai masukan dan menambah wawasan mengenai perekonomian daerah terutama tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal.

5. Untuk Universitas Negeri Jakarta, sebagai bentuk sumbangsih bagi keberhasilan dan kesuksesan mahasiswa yang berperan dalam bidang ekonomi.
6. Untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagai usaha dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas untuk lebih memfokuskan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
7. Untuk masyarakat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk permasalahan pendapatan daerah.
8. Untuk peneliti lain, sebagai bahan awal yang diharapkan untuk diteliti lebih jauh demi menambah pengetahuan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal.